

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI
*E-COMMERCE***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

ANDI TENRI AJENG P.

NIM : 10500113292

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI TENRI AJENG P.
NIM : 10500113292
Tempat/Tgl. Lahir : Pare-Pare, 06 Februari 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jln. Poros Mala'lang No. 99, Kab. Gowa
Judul : Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Makassar, 28 Mei 2017

Penulis




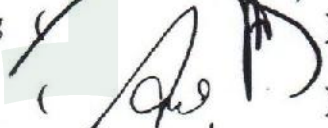


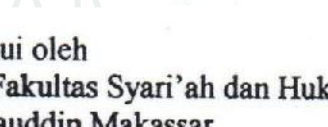
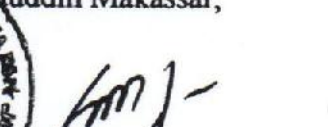
Andi Tenri Ajeng P.
NIM: 10500113292

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce”**, yang disusun oleh **Andi Tenri Ajeng P**, NIM: 10500113292, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M, bertepatan dengan 3 Dhu’l-Qi’dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 27 Juli 2017 M
3 Dhu’l-Qi’dah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	()
Munaqisy I	: Istiqamah, SH., MH	()
Munaqisy II	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	()
Pembimbing I	: Dr. Marilang S.H, M.Hum	()
Pembimbing II	: Erlina S.H., M.H	()

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji hanyalah milik Allah swt. Sang penguasa alam semesta yang dengan rahmat dan rahimnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang peneliti cintai dan mencintai peneliti atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab kepada peneliti selama ini. Serta saudara-saudari peneliti yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada peneliti. Semoga Allah swt. Mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa nerakanya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoinya. *Amin Allahumma Aminn.*

Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah, S.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah mengizinkan peneliti untuk mengangkat skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli *E-Commerce*.
4. Bapak Dr. Marilang S.H M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Erlina, S.H M.H selaku pembimbing II peneliti yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran kepada peneliti hingga bisa menyusun skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staf di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ayahanda Andi M. Takdir Hasyim dan ibunda Vita Wahyudiani serta saudara-saudari peneliti Andi Tenri Ola D, Andi Bintang, Andi Tenri Puja Aisya D, Andi Tenri Tsara Aliya D, Andi Tenri Dirvi Alzena D, serta kakek Andi Muh. Hasyim B.A dan Roesdianto dan nenek Andi Nursiah dan alm. Sri Kustini yang telah berjuang mengasuh, mendo'akan, membimbing dan membiayai peneliti selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau peneliti senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. mengasihi dan memberikan kebahagiaan.
7. Muh. Alwi Hidayat S.H yang telah memberikan motivasi, serta dukungan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Kelas Ilmu Hukum F, khususnya Kakak Iga Alfianita S.H dan Kakak Andi Rini Al Chaerani yang selama ini menjadi teman seperjuangan, dan teman berbagi suka dan duka.
9. Sahabat seperjuangan peneliti yang telah mengisi sejarah hidup peneliti, teman-teman angkatan 2013 Zenith 713 (PONPES MODERN IMMIM PUTRI MINASATE'NE PANGKEP) terutama kepada Afifah Nur Phreatia Waluyo yang selalu membantu mengingatkan dan memberi masukan untuk peneliti, serta Uswatun hasanah, Nurfadillah, Andi Syatirah, Siti Rahma, dll yang sudah membantu menyemangati peneliti.
10. Sahabat seperjuangan peneliti yang telah mengisi sejarah hidup peneliti, teman-teman Sekolah Menengah Pertama, Nurfadillah Arif, Nasrayanti, Enal Mustafa, Suriani Nur, Noni Hadriani, dan Widya Apriliani, yang sudah membantu menyemangati peneliti.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi diri peneliti pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Makassar, 02 Agustus 2017

Penyusun

Andi Tenri Ajeng P.
Nim. 10500113292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-49
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Pengertian Jual-Beli	11
3. Ayat Al-Qur'an dan Hadist tentang Jual-Beli.....	12

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	17
1. Pengertian Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	17
2. Jenis-Jenis Transaksi Dalam <i>E-Commerce</i>	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	20
C. Tujuan, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan <i>E-Commerce</i> dalam Perjanjian Jual-Beli	22
1. Tujuan Menggunakan <i>E-Commerce</i> dalam Perjanjian Jual-Beli	22
2. Manfaat Menggunakan <i>E-Commerce</i> dalam Perjanjian Jual-Beli	24
3. Kelebihan dan kekurangan Menggunakan <i>E-Commerce</i> dalam Perjanjian Jual-Beli.....	28
D. Pengaturan Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	35
1. Subjek dan Objek Jual-Beli Melalui Internet (<i>E-commerce</i>).....	35
2. Tempat Jual-Beli Melalui Internet (<i>E-commerce</i>)	36
3. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (<i>E-commerce</i>)	38
4. Dasar Hukum Sistem Perjanjian <i>E-commerce</i>	40
5. Aspek Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>) dalam Hukum Perdagangan di Indonesia	41
6. Permasalahan Hukum <i>E-Commerce</i>	48
BAB III TEORI-TEORI TENTANG SAAT TERJADINYA KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI.....	50-58
A. Teori Perjanjian Jual-Beli Jika Kedua Belah Pihak Berhadapan Langsung.....	50

1. Teori Kehendak (<i>Wilstheorie</i>).....	50
2. Teori <i>Gevaarzetting</i>	51
3. Teori Pernyataan.....	52
4. Teori Kepercayaan.....	53
B. Teori Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	54
1. Teori Kemauan	54
2. Teori Saat Mengirim Surat Penerimaan	54
3. Teori Saat Menerima Surat Penerimaan.....	55
4. Teori Saat Mengetahui Isi Surat Penerimaan	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59-89
A. Proses Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i>	59
B. Terjadinya Kata Sepakat dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-commerce</i>	65
C. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-commerce</i>	76
1. Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPdata	78
2.Keabsahan Perjanjian Menurut UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).....	87
BAB V PENUTUP	90-93
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94-96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Nama : Andi Tenri Ajeng P.
Nim : 10500113292
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce* ? 2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce* ?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur, pendapat ahli, kamus hukum. Bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku-buku ekonomi.

Hasil dari penelitian ini setelah mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan hukum perjanjian jual-beli melalui *e-commerce*, Hasil penelitian yang dilakukan bahwa keabsahan perjanjian jual beli *online* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori (*the most craracteristic*) dalam Hukum Perdata.

Implikasi dari penelitian ini adalah Pertama : hendaknya pemerintah mempersiapkan badan sebagai bentuk pengawasan atau seleksi bagi setiap orang yang akan membuat toko atau situs maya, dengan harapan bisa meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan khususnya kejahatan jual-beli melalui internet serta peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan perlindungan-perlindungan baik terhadap penjual serta pembeli yang terdapat pada perundang-undangan khususnya mengenai transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua : hendaknya masyarakat atau pengguna internet, bahwa dalam hal ingin menggunakan komputer atau media elektronik lain yang dapat terhubung dengan jaringan internet sebagai sarana untuk jual-beli atau membeli barang melalui internet ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan situs yang ingin dilihat, baik dari alamat situs yang harus jelas dan terpercaya, memiliki kontrak perjanjian atau *term of conditions* yang jelas serta tidak saling merugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Satu dekade terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non cash*).

Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan *market exposure*, menurunkan biaya operasi (*operating cost*), memperpendek waktu *product-cycle*, selain itu meningkatkan *supplier management*, melebarkan jangkauan (*global reach*), meninggalkan *customer loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *business practice* dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait didalam *value chain* tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat kita lihat dalam wujud *electronic transaction* (e-banking) melalui ATM, phone banking, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Di Indonesia sendiri, *E-Commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli melalui internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.11 Tahun 2008, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

¹ResaRaditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014) h. 1-4

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-Commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat

dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

Demikian halnya dalam jual beli *online*, seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu penulis mengkaji “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI *E-COMMERCE*”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1) Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce*.

2) Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk

menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

- c. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.
- d. Jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
- e. *E-commerce* adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefenisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce* ?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah yang menguraikan tentang norma-norma, dan pasal-pasal perundangan

- b. Pendekatan normatif (*syar'i*), yakni cara pendekatan dengan melihat dali-dalil atau nash al-Qur'an dan hadist Nabi saw yang terkait dengan judul skripsi.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari :

- a. Primer (yang diutamakan) yaitu perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan seperti kesaksian ahli, makalah diseminar dan bahan kuliah yang tertulis.
- c. Bahan non hukum, untuk tulisan ini perlu mengetahui dan memahami tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik). Contohnya : Wawancara dengan pejabat yang berwenang seperti Hakim dan Hasil dialog yang apabila substansi hukum dan dipublikasinya menjadi bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian akan mencari dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang relevan, literatur hukum di berbagai

sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, peneliti kaji sebagai sumber informasi berupa data.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat *deskriptif analisis*, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya, sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik *konklusi deskriptif*.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum dan Hukum Islam Mengenai Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*.
- b. Mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Institusi : memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*, serta menambah khazanah penelitian tentang bagaimana keabsahan dalam jual-beli melalui *E-Commerce* ini. Penelitian ini dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti dan Pengembangan IPTEK : memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perdata.
3. Bagi masyarakat : dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*, sehingga memberikan penanganan terhadap masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli

1. Pengertian Perjanjian¹

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis², sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 *BW*).

Persoalannya adalah mengapa Bab II Buku III *BW* menggunakan kedua istilah tersebut. Menurut J.Satrio bahwa dengan penyebutan secara berturut-turut istilah

¹ Marilang, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Cet ke-1, Makassar, Alauddin University Press, 2013) h. 141-142

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), h.1

kontrak atau perjanjian memang sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama¹, dan memang kontrak dan perjanjian dari sisi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas memiliki arti sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan seseorang untuk melakukan prestasi. Di sisi lain, kontrak tidak lain adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau sebaliknya perjanjian adalah kontrak dalam bentuk lisan. Dengan demikian, istilah kontrak dan perjanjian, khususnya pada judul Bab II Buku III *BW* pengertiannya sama, sehingga khusus istilah kontrak disini tidak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan dalam bentuk tertulis.

Kamus hukum menggunakan dua istilah kaitannya dengan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian dan persetujuan, dimana perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih². Sementara Pasal 1313 *BW* menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

¹ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti , 1992), h. 19

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, (Semarang, Aneka, 1977), h.248

sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi :³

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

3. Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Jual-Beli

a. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt. adalah jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Cet-Ke 11, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.1-2

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ⁴

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS an-Nisa/4 : 29

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ⁵



a. Hadist

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005) h. 58

⁵ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan Dan Tafsirnya* , (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993) h.111

Hadist ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada.

Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapaun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindar darinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia. Rasulullah SAW, “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami”.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Terjemahnya :

Ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat menurut BW, yaitu:⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*) artinya sebagai pihak pemilik barang menawarkan barangnya kepada pihak pembeli karena penjual menghendaki sejumlah uang, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Sebaliknya, pihak pembeli menghendaki barang sehingga menyetujui membeli barang milik penjual, dan pihak penjual menyetujui untuk menjual barangnya kepada pihak pembeli. Jadi hakikat sepakat dalam suatu perjanjian (jual-beli misalnya) adalah perjumpaan atau pertemuan dua kehendak yang berbeda pada satu titik dan melebur menjadi satu kesepakatan.

⁶ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Cet ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2013) h.180

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*)

Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut pasal 330 ayat (1) BW bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Artinya, setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun, maka orang tersebut telah dewasa dan sekalipun usianya belum genap 21 tahun tetapi dia telah kawin, maka orang tersebut sudah dewasa. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa jika orang telah pada usia belum genap 21 tahun, maka orang tersebut otomatis menjadi dewasa, namun apabila perkawinannya bubar sebelum usianya 21 tahun, maka dia tetap dianggap dewasa, karena tekanan usia dewasa adalah “telah kawin”. Sekalipun dalam berbagai undang-undang menetapkan batas usia seseorang menjadi dewasa berbeda-beda seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi usia dewasa laki-laki 19 tahun dan perempuan 18 tahun, namun yang dijadikan standar usia dewasa kaitannya dengan membuat perjanjian adalah genap usia 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam BW.

c. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 ayat(1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai

sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat(2) menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang sah (*legal causa*)

Istilah kausa berasal dari bahasa latin yang arti leksikalnya adalah “sebab” yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu perbuatan. Namun, kata sebab ini jika dikaitkan dengan kata “halal” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1320 BW, maka kata sebab disini tidak diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri atau tujuan yang hendak dicapai” oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

1. Pengertian Jual-Beli melalui E-commerce

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.⁷ *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*, didalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan

⁷Andreas Viklund, *E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce*, 2009, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com), (Diakses 28 Maret 2017)

pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.⁸

Kegiatan jual beli melalui internet saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli melalui internet ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli melalui internet produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁹ Jual-beli melalui internet adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, *computer*, *tablet*, dan lain-lain.

2. Jenis-Jenis Transaksi Dalam *E-Commerce*

⁸Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-Commerce, <http://Elib.Unikom.Ac.Id>, (Diakses 28 Maret 2017)

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet.1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-commerce*. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-commerce* adalah sebagai berikut :¹⁰

1) *Business to Business (B2B)*, Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) *Business to Consumer (B2C)*, transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*, Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4) *Consumer to Business (C2B)*, Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) *Non-Business electronic Commerce*, Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dll.

¹⁰ <http://Jayarmcf.blogspot.co.id/2011/02/proposal-mpph.html>, (diakses pada 17 Maret 2017)

6) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*, Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

7) *Governer to Citizens (G2C)*, Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

8) *Mobile Commerce*, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual-beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual-beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual-beli tersebut.¹¹ Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya :

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3).

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, bab IV, pasal 15.

- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2).
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15).
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat 1).
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2).

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang

dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

C. Tujuan, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan E-Commerce dalam Perjanjian Jual-Beli

1. Tujuan Menggunakan E-Commerce Dalam Perjanjian Jual-Beli¹²

Adapun tujuan dari aplikasi *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

1. *Customer*/pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan *interface*-nya menggunakan *web browser*.
2. Menjadikan portal *e-Commerce* / *e-shop* tidak sekedar portal belanja, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (*release*, *product review*, konsultasi).
3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual: responsif (respon yang cepat dan ramah), dinamis, Informatif dan komunikatif.
4. Informasi yang *up to date*, komunikasi multi-arah yang dinamis.
5. Model pembayaran: kartu kredit atau transfer.

¹² bisnis.blogspot.co.id/2015/01/e-commerce-dan-tujuan-e-commerce.html

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan *E-Commerce* bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, akan tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:

1. Menyediakan harga kompetitif
2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dll.
7. Mempermudah kegiatan perdagangan.

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan *e-Commerce* adalah:

1. *E-mail dan Messaging*
2. *Content Management Systems*
3. Dokumen, *spreadsheet*, *database*
4. Akunting dan sistem keuangan
5. Informasi pengiriman dan pemesanan
6. Pelaporan informasi dari klien dan *enterprise*
7. Sistem pembayaran domestik dan internasional
8. *Newsgroup*

9. *On-line Shopping*
10. *Conferencing*
11. *Online Banking*

2. Manfaat Menggunakan *E-Commerce* Dalam Perjanjian Jual-Beli¹³

Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan memperlihatkan bahwa *E-Commerce* dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mendapatkan pelanggan baru. Studi yang menyebutkan bahwa manfaat penggunaan *E-Commerce* dalam bisnis adalah mendapatkan pelanggan baru. Digunakannya *E-Commerce* memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar negeri.
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, di industri perbankan menemukan bahwa dengan adanya layanan *e-banking* membuat nasabah tidak berpindah ke bank lain. Selain itu bank juga akan mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari bank-bank yang bertahan dengan teknologi lama.
3. Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya *E-Commerce* memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan layanan dengan melakukan interaksi yang lebih personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa

¹³<https://nindyastuti52.wordpress.com/2011/01/28/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis-online/>

yang diinginkan oleh konsumen. Studi yang menyebutkan bahwa penggunaan *e-commerce* dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh *Gosh*.

4. Melayani konsumen tanpa batas waktu. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, menemukan bahwa adanya pelanggan dapat melakukan transaksi dan memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa harus terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu perusahaan tersebut.

E-commerce memberikan pilihan kepada produsen tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan dikembangkan. Dengan mengimplementasikan *e-commerce*, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar kepada pasar global atau hanya fokus terhadap segmen pasar tertentu. Bagi usaha kecil dan menengah, dengan menggunakan *e-commerce* dapat menawarkan sesuatu yang berkualitas dan terjangkau serta memiliki kepercayaan diri menghadapi pesaing. Biaya tidak kemudian menjadi kendala utama, tetapi yang terpenting bagaimana usaha kecil dan menengah dapat menunjukkan produk atau jasa yang ditawarkan melalui *websitenya* dan dapat dilakukan melalui penjualan secara *online*.

Dengan menggunakan *e-commerce*, produsen dapat merubah daftar harga atau melakukan kustomisasi produk atau jasa yang ditawarkan dan terinformasikan secara cepat melalui *website*. Sesuatu yang biasanya memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan atau diintegrasikan, dengan

e-commerce menjadi lebih cepat. Melakukan model usaha yang inovatif atau melakukan re-engineering, melaksanakan spesialisasi dengan derajat yang tinggi atau meningkatkan produktivitas dan perhatian terhadap pelanggan, bukan sesuatu yang tidak mungkin dengan *e-commerce*. *E-commerce* juga bermanfaat dalam membangun database pelanggan yang komprehensif. Produsen dapat mempunyai informasi tentang pola pemesanan yang dilakukan pelanggan dan mengelolanya sebagai informasi yang berharga. Database tersebut akan membantu produsen saat melakukan pemasaran dan strategi promosi agar dapat tepat sasaran.

Dalam konteks hubungan dengan mitra bisnis, *e-commerce* membantu dalam mengurangi inefisiensi yang mungkin terjadi dalam rantai penawaran, mengurangi kebutuhan untuk membuat *inventory* dan menghindari keterlambatan pengiriman. Sehingga produsen mempunyai kepercayaan diri tentang usaha yang dijalankan dalam melakukan kerjasama dengan pemasok dan perusahaan jasa. *E-commerce* secara *inherent* akan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis yang mendukung, menggabungkan dengan kecepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam hubungannya dengan pelanggan, *e-commerce* membantu dalam memfasilitasi kegiatan pembelian yang nyaman. *E-commerce* dapat menghemat waktu pelanggan dibandingkan jika pelanggan tersebut melakukan pembelian secara *off-line*. Seringkali pelanggan membayar lebih

murah untuk harga produk tertentu dibandingkan jika pelanggan membelinya secara *off-line*.

Meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaan *e-commerce* juga menghadapi kendala. Melakukan kegiatan transaksi secara *online* berarti pelanggan akan terpaksa menyediakan sejumlah informasi pribadi yang dipersyaratkan oleh penjual. Persyaratan ini tentunya dapat mengganggu kerahasiaan dan menimbulkan isu tentang keamanan dari informasi yang disediakan. Protokol untuk proses tertentu yang belum standard, bandwidth telekomunikasi yang terbatas dan keterbatasan *software* yang digunakan, merupakan beberapa isu teknis yang mengakibatkan *e-commerce* masih kurang terintegrasi dengan sistem IT yang kontemporer.

Disamping kendala teknis, isu non teknis juga menjadi kendala dalam penggunaan *e-commerce*. Masih banyak pembeli yang tidak percaya dan susah merubah kebiasaannya untuk bertransaksi tanpa bertemu langsung dengan penjualnya dan menggunakan kertas yang terbatas (*paperless*). Kenyataan bahwa hukum sering berdasar pada obyek fisik maka hal ini akan menimbulkan masalah yang serius terhadap bisnis karena ketidak pastian hukum dari proses tersebut. Status hukum dari transaksi yang dibentuk secara otomatis, belumlah jelas. Apakah mungkin untuk sebuah perjanjian atau yang lebih umum, prosedur hukum dibuat oleh sebuah komputer.

Disamping hal tersebut di atas, seperti bisnis *online* yang sangat bergantung pada internet, *web server* dan aplikasi berbasis *web* untuk sehari-hari dalam bisnis, maka *web hosting* sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan usaha. Keamanan yang ketat dan kuat, kehandalan sempurna, integritas data dan *downtime* seminimal mungkin adalah kriteria utama untuk memilih *e-commerce web hosting*.

Sebuah *e-commerce webhosting* membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi karena berhubungan dengan transaksi keuangan yang berjalan setiap hari. Sebuah kesalahan kecil dapat berubah menjadi kesalahan fatal yang membuat kerugian besar bagi pemilik bisnis. Apalagi saat ini semakin marak kejahatan *cyber*, *website e-commerce* menimbulkan tantangan lebih dari penyusup yang tidak sah dan *hacker cyber*. Orang-orang ini bisa menyedot uang secara ilegal jika sistem keamanan *webhosting* yang dipilih lemah. Karena itulah wajib memilih *webhosting* dengan sistem keamanan yang tepat di tempat yang terbaik.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Menggunakan *E-Commerce* Dalam

Perjanjian Jual-Beli

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli melalui *e-commerce*, ada kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli melalui *e-commerce*, yaitu :

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual-Beli Melalui *E-Commerce* bagi pelaku usaha

Ada beberapa kelebihan jual-beli melalui *e-commerce*, yaitu :¹⁴

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya.

Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media elektronik (*online*).

- 2) Jual-beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual-beli melalui *e-commerce* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.

Contoh : Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang dikantor, pengusaha tersebut menganjurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.

- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis.

¹⁴ .Arip Purkon, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.20

Contoh : Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.

- 4) Jual-beli melalui *e-commerce* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain.

Contoh : Ale' seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu SMP ternama di Makassar, namun itu tidak mengganggu usahanya karena Ale' menerapkan penjualan *online* sejak 2 tahun yang lalu.

- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar.

Contoh : Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti *zalora*, *berniaga.com*, *olx*, *lazada*, dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas.

- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya.

Contoh : Banyaknya *website* yang menyediakan layanan jual-beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.

- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.

Contoh : Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi dari 2 negara yang berbeda.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli melalui *e-commerce* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu :¹⁵

- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, apalagi berkenaan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *online shopping* karena takut terjadinya kepenipuan.
- 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *online* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi.

¹⁵ . Arip Purkon, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.20

- 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para *hacker* yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Contohnya, pelaku usaha memasarkan produknya melalui *social media facebook*, akan tetapi akun *facebooknya* telah di hack oleh *hacker* sehingga mengambil alih akun pelaku usaha yang dapat berakibat kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.
 - 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen sehingga barang yang dibeli konsumen tidak sampai kepada konsumen karena pengiriman barang kepada alamat yang salah.
 - 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (*server*). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja. Contohnya, toko *online* yang sedang ramai dikunjungi oleh konsumen, akan tetapi pelaku usaha tidak dapat berkomunikasi dengan konsumen akibat terganggunya jaringan internet yang berakibat konsumen tidak jadi memesan barang atau produk pelaku usaha.
- b. Kelebihan dan Kekurangan Jual-Beli Melalui *E-Commerce* bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli melalui *e-commerce* bagi konsumen, yaitu:¹⁶

- 1) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang diinginkan melalui media *online* dimanapun dan kapanpun, meskipun konsumen hanya berada dirumah.
- 2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa berbelanja atau melakukan transaksi melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari sebuah situs *online* penjualan barang kemudian memesan barang dikolom komentar situs tersebut.
- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a, b, maupun c.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup.
- 5) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet* atau pasar tradisional. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas suatu daerah, akan tetapi makanan khas tersebut tidak

¹⁶ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, h. 112

terdapat diwilayah tempat tinggal konsumen, sehingga konsumen memesannya secara *online*.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi *online*, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual-beli *online*, seperti :¹⁷

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha.
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja.
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa diinginkan.
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*.

¹⁷ . Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, h. 113

- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual-beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.

D. Pengaturan Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)

A. Subjek Dan Objek Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Dalam transaksi jual-beli melalui internet, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual-beli melalui internet tidak berbeda dengan jual-beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian melalui internet terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya

pelaku jual-beli melalui internet kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual-beli melalui internet, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual-beli melalui internet. Sangat berbeda dengan jual-beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual-beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

2. Tempat Jual-Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan melalui internet (e-commerce), yaitu :¹

a. Marketplace

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. Website

¹.Marketing. "Lima Tempat Jualan Online". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/Lima-tempat-jualan-online.html> (03 mei 2017).

Seorang pelaku usaha melalui internet dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis melalui internet. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hasting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah OLX.com.

c. *Weblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bias mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www.bajumuslimah.blogspot.com, <http://ajengfashion.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan melalui internet yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual-beli. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up*

terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaktus.co.id, Paseban.com

e. Media sosial

Media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah *Instagram, Facebook, Twitter*, dan lain-lain.

3. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang

dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem *cash*, *transfer* melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Dalam mekanisme jual beli melalui internet hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.²

²Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Cet. Ke-1 ; Makassar : Alauddin University Press, 2012) h. 242.

4. Dasar Hukum Sistem Perjanjian *E-Commerce*

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH-Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.³

Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam persidangan hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.⁴

Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak atau perjanjian khususnya dalam kontrak jual beli secara elektronik menjadi sebuah fenomena yuridis yang relatif baru

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 1.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 59.

bagi hukum positif Indonesia pada umumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap aspek hukum pembuktian pada khususnya.

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Paton dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence* disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat *Oral, documentary*, atau *materiil*, alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*, alat bukti yang bersifat *documentary* adalah alat bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat *materiil* adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen.

Membuktikan berarti menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan⁵

5. Aspek Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik (*Electronic Commerce*) Dalam Hukum Perdagangan Di Indonesia

Dikarenakan belum adanya aturan perundangan (hukum positif) yang mengatur transaksi perdagangan dengan model transaksi elektronik (*electronic commerce*) , maka dibatasi pada beberapa aspek hukum dalam perdagangan di Indonesia yaitu dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian yang berlaku

⁵ . R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hal. 1.

termasuk juga dari KUHPerdara yang menjadi dasar atau sumber dari perikatan untuk adanya kesepakatan melakukan transaksi perdagangan yang selama ini telah digunakan sebagai dasar dari transaksi perdagangan konvensional .

Aspek hukum Perjanjian tersebut adalah :

1. Perjanjian dalam perdagangan
2. Legalitas Perjanjian perdagangan

A. Perjanjian dalam perdagangan

Mengacu pada 2 prinsip kebebasan sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional :

1. *Freedom of Commerce* atau prinsip kebebasan berniaga. Niaga ini diartikan luas dari sekedar kebebasan berdagang (*Freedom of Trade*). Niaga disini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan. Jadi setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan pihak atau negara manapun di dunia.
2. *Freedom of Communication* (kebebasan berkomunikasi, yaitu bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk memasuki wilayah negara lain, baik melalui darat atau laut untuk melakukan transaksi perdagangan internasional.

Sistem hukum Indonesia tentang perikatan yang secara mendasar dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu :

1. *Perjanjian Konsensual* -- perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

2. *Perjanjian Riil*--perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan

3. *Perjanjian Formil*—ada kalanya perjanjian yang konsensual, adapula yang disaratkan oleh Undang-Undang, di samping sepakat juga penguatan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam buku III KUHPerdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak. *Electronic data transmission* dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dapat diantisipasi dengan adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap data dengan menggunakan sistem pengamanan dengan *Digital Signature*. *Digital Signature* selain sebagai sistem teknologi pengamanan berfungsi pula sebagai suatu prosedur teknis untuk melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik atau standart prosedur suatu perjanjian dalam transaksi elektronik , dari proses penawaran hingga kesepakatan kesepakatan yang di buat para pihak.

B. Legalitas dalam perdagangan

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum antara dua pihak, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan di pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu dalam sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III BW tentang perikatan yang secara mendasar dibedakan atas perjanjian *konsensual*, *riil* dan perjanjian *formil*.

Untuk halnya legalitas dalam perjanjian perdagangan *electronic commerce* pada dasarnya tak ada bedanya dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara yang menurut pasal 1320 KUHPerdara sahnyanya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat subyektif adalah :

1. Kesepakatan, dan
2. Kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan.

Sedangkan syarat obyektif, adalah :

1. Suatu hal yang tertentu (obyeknya harus jelas), dan
2. Merupakan suatu kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum).

Syarat sahnyanya perjanjian, adanya kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perikatan. Kesepakatan inilah yang menjadikan perbuatan tersebut dapat dilaksanakan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan kewajiban yang mutlak setelah perjanjian ini disepakati, sehingga ini akan melahirkan sebuah konsekuensi hukum bagi keduanya untuk mentaati dan melaksanakannya dengan suka rela. Jika pada perjanjian transaksi melalui media

elektronik perbedaanya terletak pada prosesnya saja yaitu perjanjiannya melalui elektronik.

Dalam perdagangan era modern sekarang ini, pelaku bisnis banyak sekali yang terjun dalam *E-Commerce* untuk mempermudah dalam melakukan transaksi bisnis dan dalam hal ini *E-Commerce* juga membawa manfaat yang sangat besar salah satunya adalah efisiensi waktu. Sebagai suatu negara yang berkembang, Indonesia tak luput dari kegiatan *E-Commerce*. Hingga saat ini pun Indonesia belum mampu untuk menghadirkan suatu peraturan atau produk hukum yang tegas mengatur mengenai *E-Commerce*. Sehingga yang masih menjadi pertanyaan adalah mengenai legalitas dari kontrak perdagangan elektronik (*E-Commerce*) serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam kegiatan *E-Commerce* ini yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *payment card* dalam transaksi *electronic commerce*.

Menurut WTO (*World Trade Organization*), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa elektronik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem perdagangan beralih ke media elektronik yaitu :

1. *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara *up to date* dan terus-menerus.
2. *E-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik.

3. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi dan murah serta informatif.
4. *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mengingat *E-commerce* memiliki model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global (*global communication network*). Di negara Inggris permasalahan-permasalahan terkait dengan transaksi elektronik telah diatur yang didasarkan pada putusan pengadilan (*yurisprudensi*) dalam perkara *In Re Charge Services Limited*. Perkara tersebut berisi suatu analisis yuridis mengenai hubungan-hubungan hukum yang tercipta apabila suatu *card* digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang mengatur dan menegaskan mengenai penggunaan suatu *card* untuk transaksi atau dengan kata lain yaitu *payment card*. Dalam putusan tersebut, yang merupakan *leading case* di Inggris, hakim Millet J memutuskan pembayaran dengan *charge card/credit card* adalah pembayaran mutlak, bukan pembayaran bersyarat kepada pihak merchant. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai pembayaran menggunakan kartu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa alat pembayaran dengan menggunakan kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu prabayar. Dan dalam pasal 1 angka 4 berbunyi “Kartu Kredit adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi lebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tidak diatur secara rinci mengenai sanksi terhadap resiko penyalahgunaan *payment card* sehingga di Indonesia sendiri tidak secara eksplisit diatur sedemikian rupa melainkan secara implisit saja dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank. Dalam surat keputusan itu pun tidak diatur mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pengguna *payment card* dalam transaksi *electronic commerce*.

6. Permasalahan Hukum E-Commerce

E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan seperti diatas, ternyata telah diatur di Inggris yang didasarkan pada putusan pengadilan dalam perkara *In Re Charge Services Limited*. Perkara tersebut berisi suatu analisis yuridis mengenai hubungan-hubungan hukum yang tercipta apabila suatu *card* digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam putusan tersebut, yang merupakan *leading case* di Inggris, hakim Millet J memutuskan pembayaran dengan *charge card/credit card* adalah pembayaran mutlak, bukan pembayaran bersyarat kepada pihak merchant.

Selain itu Millet juga berpendapat, dalam penggunaan kartu, secara serempak bekerja tiga perjanjian yang satu sama lain saling terpisah, yaitu:

1. Perjanjian penjualan barang dan/atau jasa antara pedagang.
2. Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu.
3. Perjanjian antara *issuer* dengan *card holder*.

Selama ini penggunaan *charge card/credit card* di internet, ataupun di berbagai merchant secara offline, seperti di berbagai pusat perbelanjaan memang rawan dari penyalahgunaan. Kerawanan ini terjadi sebab pihak merchant dapat memperoleh nomor kartu kredit beserta masa berlakunya yang tentunya dapat digunakan untuk melakukan transaksi *e-commerce*.

BAB III

TEORI-TEORI TENTANG SAAT TERJADINYA KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI

A. Teori Perjanjian Jual-Beli Jika Kedua Belah Pihak Berhadapan Langsung

1. Teori Kehendak

Menurut teori ini perjanjian mengikat, jika kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) patut dihormati.¹

Prinsip yang ditarik dari teori kehendak adalah suatu persetujuan yang didasarkan pada suatu kehendak yang benar merupakan persetujuan atau perjanjian yang tidak sah. Konsekuensi hukum dari teori ini adalah : **Pertama**, kalau orang memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya. **Kedua**, perjanjian tidak lahir atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, menurut teori ini, pernyataan bisa mengikat apabila pernyataan itu didasarkan atas kehendak yang benar.

Di era kemajuan teknologi yang sangat modern dewasa ini, pembuktian atas adanya perbedaan atau persamaan antara kehendak dengan pernyataan seseorang dalam mengadakan perjanjian sudah sangat mudah dilakukan.

¹. J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Cet Ke 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) h. 195

Misalnya, perjanjian atau kontrak melalui internet dan perjanjian lisan melalui *handphone* sudah sangat mudah dilakukan dengan cara memfrint tulisan dala internet dan hasil pembicaran melalui *handphone*. Kemudian, menjadi lebih mudah lagi jika penawaran dan pernyataan menerima penawaran dilakukan melalui telegram dan surat, karena duplikat konsep penawaran melalui telegram tetap tersimpan dengan baik.

Pertanyaannya kemudian, apakah pernyataan tidak diperlukan jika lahirnya perjanjian didasarkan pada kehendak? Tentu, pernyataan tetap merupakan keniscayaan yang sangat diperlukan, karena hanya melalui pernyataan, kehendak seseorang dapat diketahui atau dibaca, namun demikian kehendak seseorang itulah menjadi dasar pokok lahirnya perjanjian, bukan pada pernyataannya karena pernyataan hanyalah sarana yang digunakan untuk mengetahui atau membaca kehendak yang sebenarnya dari seseorang.

2. Teori *Gevaarzetting*

Teori *gevaarzetting* menekankan kepada perbuatan manusia atau pihak-pihak dalam perjanjian bahwa setiap orang harus bertanggung jawab sendiri terhadap kekeliruan dari ucapan, tulisan, dan sikap atau isyaratnya. Prinsip dari teori tersebut menjadi logis karena siapapun yang melakukan kekeliruan dan membahayakan atau merugikan orang lain, maka ia harus bertanggung jawab. Betapa banyak orang akan menanggung kerugian apabila pihak yang merugikan dapat dibebaskan dari tanggung jawab hanya karena alasan

“keliru” melakukan suatu perbuatan (menyatakan kehendak dalam perjanjian).

Dengan demikian, menurut teori ini bahwa setiap orang atau pihak harus menerima konsekuensi terhadap perbuatannya sendiri dalam bentuk kewajiban menanggung segala perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, apabila teori ini dijadikan pegangan, maka setiap orang atau pihak dalam mengadakan perjanjian akan lebih berhati-hati menyatakan kehendaknya baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau sikap dan isyarat sebagai wujud dari kehendaknya, karena teori ini tidak memperdulikan apakah orang atau pihak itu dalam menyatakan kehendaknya keliru atau tidak.

3. Teori Pernyataan

Jika teori Kehendak menyatakan bahwa saat lahirnya perjanjian pada saat lahirnya “kehendak”, maka teori pernyataan merupakan kebalikannya yaitu bahwa kehendak seseorang tidak dapat diperpegangi sebagai patokan saat lahirnya kesepakatan dalam suatu perjanjian karena kehendak seseorang belum bisa dibaca atau diketahui sekaligus tidak dapat dibuktikan secara yuridis dan hanya melalui pernyataan seseorang dapat dipastikan kehendak seseorang. Misalnya, pihak yang menawarkan sesuatu kepada pihak lainnya, maka kehendak pihak lawannya untuk menerima tawaran itu dapat diketahui secara pasti ketika penerima tawaran tersebut dinyatakan secara tegas. Oleh karena itu, apabila pihak penawar menawarkan sesuatu melalui surat,

telegram, internet dan atau handphone, maka nanti setelah pihak yang menerima tawaran tadi menyatakan penerimaannya barulah dinyatakan timbul kesepakatan. Untuk itu subekti mengemukakan bahwa karena suatu perjanjian lahir pada detik terjadinya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*), apabila seseorang melakukan suatu penawaran dan penawarannya itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, sebab pada saat menulis surat balasan yang isinya menerima penawaran, maka surat tersebut merupakan pernyataan kehendak menerima penawaran.

Demikian juga J.Satrio mengemukakan bahwa menjadi patokan lahirnya kesepakatan dalam perjanjian menurut teori pernyataan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak. Kepastian hukum dalam pergaulan hidup bahwa orang harus bisa berpegang pada pernyataan-pernyataan orang lain.

4. Teori Kepercayaan

Dasar lahirnya Teori Kepercayaan adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Teori Kehendak dan Teori Pernyataan. Menurut R.Pound bahwa Teori Kepercayaan menyatakan “Unsur kepercayaan atau penghargaan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya sepakat.

Teori kepercayaan pada hakikatnya menyatakan bahwa yang menjadi dasar atau patokan lahirnya sepakat untuk lahirnya perjanjian adalah pernyataan seseorang yang dibatasi oleh apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru. Oleh karena itu yang menentukan “bukan pernyataan orang tetapi keyakinan atau kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut”.¹

A. Teori Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

1. Teori Kemauan

Teori ini menyatakan bahwa perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah melahirkan kemauan penerima tawaran. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-commerce*, maka kemauan pihak penerima penawaran dinyatakan lahir ketika atau saat pihak penerima tawaran mulai menulis surat pernyataan menerima tawaran.

2. Teori Saat Mengirim Surat Penerimaan

Teori ini menekankan bahwa perjanjian dinyatakan terjadi atau lahir pada saat surat pernyataan menerima tawaran oleh pihak penerima tawaran telah dikirim kepada pihak yang menawarkan. Menurut Ahmad Miru bahwa teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat surat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Cet-3, Vorkink v.Hoeve, Bandung-‘S Gravenhage

pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain.²

Dengan demikian, apabila penerima tawaran menerima tawaran pihak penawar yang dinyatakan dalam bentuk surat membuat surat yang isinya menyetujui penawaran, pada saat itu belum bisa dianggap telah terjadi kesepakatan, tetapi nanti setelah surat tersebut dikirim barulah dianggap terjadi kesepakatan.

Jika teori pengiriman dianut, maka konsekuensi hukumnya adalah sekalipun pihak penerima tawaran ditawari sesuatu dengan harga yang lebih murah dari orang lain selain dari orang yang pertama menawarkan sesuatu kepadanya, pihak penerima tawaran tidak boleh serta merta menyatakan menerima tawaran dari orang lain tadi sekalipun harganya lebih murah dari penawaran pertama, karena tawaran pertama telah mengikat dirinya karena dia telah mengirim surat penerimaannya.

3. Teori Saat Menerima Surat Penerimaan

Teori ini menyatakan bahwa perjanjian dinyatakan telah lahir pada saat pihak penawar telah menerima surat pernyataan menerima tawaran sampai/diterima oleh pihak yang menawarkan. Demikian juga Ahmad Miru menyatakan bahwa maksud teori ini adalah kesepakatan terjadi manakala

². Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) h. 52.

jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.

4. Teori Saat Mengetahui Isi Surat Penerimaan

Teori ini menekankan bahwa perjanjian baru dinyatakan lahir pada saat pihak yang menawarkan telah membuka dan membaca surat penerimaan dari pihak yang menerima tawaran. Menurut Ahmadi Miru bahwa maksud teori ini adalah bahwa terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut.

Teori Penerimaan dan Teori Pengetahuan tersebut, secara akademik masih dipersoalkan bahwa apakah penerimaan kontrak jawaban oleh pihak penawar dihitung sejak surat itu diterimanya ataukah nanti setelah pihak penerima jawaban telah membaca dan mengetahui isi surat jawaban ? karena bisa saja pihak penawar telah menerima surat jawaban tetapi nanti beberapa hari kemudian baru dibuka dan dibaca oleh pihak penawar. Teori penerimaan mengklaim bahwa sepakat timbul sejak pihak penawar telah menerima surat penerimaan tawaran sekalipun belum dibacanya, sedangkan Teori Pengetahuan mengklaim bahwa sepakat dianggap terjadi saat penerima tawaran mengetahui isi surat jawaban dengan alasan bahwa bisa saja pihak penawar telah menerima surat, akan tetapi belum tentu dia buka dan baca apa isinya. Sepanjang pihak penawar belum tau isi surat jawaban, sepanjang itu

juga pihak penawar belum bisa memenuhi kewajibannya sebab dia belum tau apa yang akan ditunaikannya.³

Menurut penulis, keempat teori tersebut pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing jika diterapkan dalam praktiknya seperti yang dikatakan oleh Bapak Marilang dalam bukunya. Oleh karenanya, memang diperlukan pertimbangan *ekstra legal* dalam memilih salah satu teori tersebut untuk diterapkan terhadap kasus-kasus yang konkrit. Seperti jika teori pengiriman dianut, maka konsekuensi hukumnya adalah sekalipun pihak penerima tawaran ditawari sesuatu dengan harga yang lebih murah dari orang lain selain dari orang yang pertama menawarkan sesuatu kepadanya, pihak penerima tawaran tidak boleh serta merta menyatakan menerima tawaran dari orang lain tadi sekalipun harganya lebih murah dari penawaran pertama, karena tawaran pertama telah mengikat dirinya karena dia telah mengirim kontrak penerimaannya. Contohnya, Andi menawarkan sebuah mobil tahun 2012 kepada Bani dengan harga Rp. 200.000.000,-. Setelah Bani membalas/mengirim kontrak penerimaannya/persetujuannya kepada Andi, tiba-tiba Cakra menawarkan juga mobil tahun 2012 kepada Bani dengan harga lebih murah dari penawaran Andi yaitu sebesar Rp. 185.000.000,-. Konsekuensi hokum yang timbul dalam contoh ini adalah bahwa Bani tidak boleh serta merta menerima tawaran Cakra dan membatalkan secara sepihak

³ . Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Makassar : Alauddin University Press 2013, h. 203-220

penawaran Andi, karena dengan telah mengirim kontrak penerimaannya terhadap tawaran Andi, maka Bani telah terikat secara hukum dengan Andi dalam perjanjian jual-beli mobil tadi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Proses Jual-Beli Melalui E-Commerce*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang

menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. Pembayaran, dapat dilakukan misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem

keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
- b. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang dimaksud. Pada kenyataannya,

barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Contoh kasus :

Tahap pertama, pembeli membuka situs *online* penjual / pelaku usaha dan memilih barang yang hendak membelinya.

Tahap kedua, Setelah memilih dan mendapatkan barang yang dikehendaknya, pembeli meng-klik *link* informasi mengenai toko pelaku usaha/penjual barang yang diinginkannya itu, lalu mengisi format pengiriman seperti nama penerima, alamat, nomor telepon, dan *detail* mengenai barang yang diinginkan dan dikirim ke pelaku usaha/penjual.

Tahap ketiga, Setelah format pengiriman dikirim, maka penjual pun memberikan format cara pembayaran, seperti nomor-nomor rekening *bank* untuk pembeli membayar harga dari barang yang hendak dibelinya itu.

Tahap keempat, setelah pembeli mentransfer uangnya ke rekening bank pihak penjual, maka orderan pembeli pun diproses oleh pihak penjual atau pelaku usaha.

Menurut penulis, dari contoh proses transaksi jual-beli tersebut maka dapat disimpulkan kata sepakat terjadi pada saat pembeli telah mentransfer bayaran/uangnya ke rekening bank pihak penjual.

Dari contoh proses transaksi jual-beli itu, jika dikaitkan dengan teori-teori perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* yang terdapat pada Bab III dalam skripsi ini, dapat dilihat teori manakah yang sesuai dengan contoh kasus diatas. Teori-teori tersebut yaitu :

- a. Pada teori pertama, menyatakan bahwa kata sepakat terjadi setelah pembeli mengetahui isi surat atau penawaran yang diberikan oleh penjual melalui surat-menyurat, sama halnya dengan internet (dalam hal ini secara tertulis). Penjual yang mengirim penawaran untuk menjual barang dagangannya kepada pembeli, lalu setelah pembeli membuka dan membaca isi surat (penawaran) yang ditawarkan oleh penjual, dan pembeli menyetujui isi surat tersebut, maka saat itulah kesepakatan terjadi menurut teori ini. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis,

yaitu pembeli yang mengisi format pengiriman sebagai tanda bahwa pembeli menyetujui penawaran yang diberikan pihak penjual.

- b. Pada teori kedua, menyatakan bahwa saat penjual mengirim surat (penawaran) ke pembeli, dan pembeli mengetahui isi surat (penawaran) yang dikirim oleh penjual. Menurut teori ini saat itu belum terjadi kata sepakat, tetapi terjadinya kata sepakat disini adalah saat sudah terbuktinya si pembeli mengirim surat balasan kepada si penjual bahwa pembeli menyetujui isi surat (penawaran) yang dikirim oleh penjual. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu pembeli yang mengirimkan format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) sebagai tanda bahwa pembeli menyetujui penawaran yang diberikan pihak penjual.
- c. Pada teori ketiga, bahwa penjual mengirim surat (penawaran) ke pembeli, dan pembeli membuka surat (penawaran) tersebut dan mengetahui isi suratnya. Setelah pembeli mengirimkan surat balasan atas surat (penawaran) penjual, maka terjadinya kesepakatan disini ialah saat penjual pun mengetahui bahwa pembeli sudah mengetahui isi surat (penawaran) yang ditawarkannya. Seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu pembeli yang mengirim format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) kepada penjual, dan penjual pun menerima format pengiriman tersebut.

- d. Pada teori keempat, bahwa setelah pembeli mengirimkan surat balasan atas surat (penawaran) penjual, dan penjual pun menerima surat balasan (format pengiriman) dari pembeli tersebut, maka kesepakatan terjadi saat penjual menerima dan membuka surat (format pengiriman) tersebut dan mengetahui isi surat keseluruhannya. Seperti dalam contoh kasus diatas, pembeli yang mengirimkan format pengiriman (nama penerima, alamat, detail barang, dll) kepada penjual, dan penjual pun mengirimkan nomor rekening kepada pembeli untuk membayar harga dari barang yang diinginkan oleh pembeli tersebut.

Dari keempat teori itu, penulis berpendapat bahwa tidak ada diantara ke empat teori-teori tersebut yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual-beli *e-commerce*. Alasannya bahwa seharusnya teori ke empatlah yang dapat diterapkan tetapi faktanya hak menuntut kepada pihak lawan janji (penjual) sangat sulit direalisasikan dan sampai saat ini, hak tuntutan kepada lawan janji (penjual) yang berkewajiban, belum ada yang sampai ke pengadilan.¹

B. Terjadinya Kata Sepakat Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Dalam suatu kegiatan perdagangan *online* yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan kesepakatan tersebut terjadi?

Dalam penjelasan mengenai teori-teori yang dijelaskan pada bab III dalam skripsi ini, diperlukannya teori baru yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual-beli *e-commerce*.

Maka dari itu penulis membuat teori baru yang kiranya sesuai dengan contoh kasus yang dijelaskan dalam proses transaksi jual-beli *e-commerce*, dapat menjelaskan bahwa terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual itu adalah pada saat pembeli sudah mentransfer bayaran atau uang untuk membeli barang dari toko si penjual atau pelaku usaha.

a. Teori kelima, yaitu Teori Saat Mengirim Syarat Penerimaan

Teori ini menekankan bahwa perjanjian baru dinyatakan lahir pada saat pihak yang menawarkan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang menerima tawaran berupa klasifikasi cara pembayaran atas barang yang ditawarkannya, yaitu dengan memberikan nomor rekening agar pihak yang menerima tawaran mengirimkan bayaran/uang sebagai syarat agar barang yang ditawarkan tersebut diproses atau ditindaklanjuti agar berpindah tangan dari pihak yang menawarkan ke pihak yang menerima tawaran.

Teori ini mengklain bahwa kata sepakat timbul sejak penerima tawaran telah memenuhi syarat yaitu mengirimkan bayaran/uang ke pihak yang menawarkan sebagai syarat untuk mendapatkan barang yang ditawarkan (Das Sein).

Maka dari itu, secara keseluruhan penulis mengungkapkan bahwa teori kelimalah yang sesuai dengan contoh kasus yang penulis angkat, dimana kata sepakat dalam teori kelima terjadi pada saat pembeli telah memenuhi persyaratan yaitu mentransfer bayaran/uang untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh penjual (Das Sollen).

Menurut penulis, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian.

Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis.

Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya

mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wet Boek* (KUHPperdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya.

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, *double click* hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut.²

2. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1913/kapan-suatu-kesepakatan-terjadi-dalam-transaksi-ecommerce> (diakses 3 mei 2017)

Ringkasnya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli, lalu pembeli mengisi format pengiriman tersebut dan mengirimkannya kembali kepada penjual. Maka dalam perjanjian *e-commerce* jika pihak pembeli telah mengirim format pengiriman yang telah diisinya terlebih dulu ke pihak penjual dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPer, untuk “adanya” perjanjian harus dipenuhi empat syarat, salah satunya adalah “persetujuan atau kesepakatan” dari mereka yang mengikatkan diri. Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan. Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana-sarana lain, seperti surat tertulis, *faximillie*, telepon atau via internet. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan kapan dan dimanakah persisnya terjadinya perjanjian itu. Karena sebagaimana diatur di dalam pasal 1458 KUHPer bahwa Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPer (Pasal 1459 KUHPer).

Saat terjadi transaksi jual beli melalui internet perjanjian ini tidak terjadi dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya kesepakatan ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Selain itu dalam pasal 1458 KUHPdata disebutkan bahwa perjanjian jual beli itu sudah sah begitu adanya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga meskipun belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Untuk menjawab hal ini, maka kita akan melihat beberapa teori tentang saat terjadinya kesepakatan. Ada empat teori yang mengemukakan mengenai saat terjadinya kesepakatan, yaitu :

1. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
2. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya,

bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

4. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Berdasarkan dari teori saat terjadinya kesepakatan tersebut di atas, maka dapatlah digunakan teori Penerimaan, bahwa terjadinya kesepakatan saat penjual yang mempunyai toko *online* menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli. Bentuk pernyataan sepakat dalam jual beli melalui internet ini dapat dilakukan dalam beberapa pola. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui *single click*, "*double click*" hingga *three click*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan sepakat dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut.

Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara *online* ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPdata tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.³

³. <http://dianisumadi.blogspot.co.id/2015/08/kajian-saat-terjadinya-kesepakatan.html> (diakses 3 mei 2017)

Seperti halnya dalam jual-beli tradisional, bahwa perjanjian jual-beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang kebendaan dan harga atas barangnya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, dan harga juga belum dibayarkan. Begitu juga dalam jual-beli berbasis *e-commerce*, bahwa lahir dan mulai berlakunya suatu perjanjian jual-beli berbasis *e-commerce* adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak, kecuali dijanjikan lain. Dimana kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Jadi, dengan kata lain suatu perjanjian elektronik itu lahir ketika penawaran transaksi telah dikirim oleh Pengirim dan telah diterima oleh Penerima. Tetapi saat terjadinya kesepakatan seperti demikian dapat saja disimpangi oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tentang bagaimana kesepakatan itu akan tercapai. Mengenai kapan waktu pengiriman dan penerimaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU-ITE.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim dan jika tidak diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa berlaku dan mengikatnya perjanjian jual-beli elektronik terjadi sesuai dengan kemauan para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukan tentang kapan harus dicapainya detik kesepakatan, maka ketentuan yang ada pada UU ITE dan aturan pelaksanaannya lah yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang serah terima barang/penyerahan/*levering* yang menjadi syarat berpindahnya hak kepemilikan suatu benda yang menjadi objek transaksi jual-beli, dari penjual kepada pembeli. Bahwa ketika barang yang telah disepakati sebagai pokok transaksi jual-beli dikirim oleh pengirim (penjual) dan diterima oleh penerima (pembeli) pada detik itulah hak kepemilikan atas benda tersebut beralih. Hal tersebut dengan diikuti kewajiban pengirim (penjual) memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.

Ketentuan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian konvensional. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

1. Iktikad baik;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Kewajaran.

Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Begitu juga dalam perjanjian jual-beli berbasis *e-commerce*, bahwa suatu perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) PP 82/2012.

Dengan demikian perjanjian *e-commerce* telah memiliki payung hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum seperti halnya perjanjian konvensional. Perjanjian

e-commerce wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian.

Apabila syarat diatas tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Perjanjian dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti perjanjian tetap berlangsung selama para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian belum memintakan pembatalan dan diputuskan batal. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga yaitu adanya hal tertentu atau objek perjanjian dan yang keempat (adanya causa yang diperbolehkan) yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata disebut dengan syarat objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*). Batal demi hukum (*nietigheid/nietigvan rechts wege*) yang artinya perjanjian itu di anggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).

Walaupun dalam suatu perjanjian sudah berdasarkan dengan syarat sahnya perjanjian, perjanjian tersebut akan mempunyai akibat. Akibat dari

4 . <http://telaahhukum.blogspot.co.id/2016/02/perjanjian-electronic-commerce-sebagai.html> (diakses 3 mei 2017)

adanya perjanjian ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Berikut ini terperinci akibat dari adanya perjanjian menurut KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut dimuka hakim. Disamping itu perjanjian yang dibuat itu mengikat sifatnya kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam artian, jika membatalkan suatu perjanjian secara sepihak dilarang, karena kata sepakat antara kedua belah pihak merupakan syarat sah suatu perjanjian.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriteria dengan itikad baik memang sulit sehingga diperlukan adanya penafsiran sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya. Tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian di haruskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

C. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Terdapat hal tertentu; dan
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

1. Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPerdato

a. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara mengenai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menegaskan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdato yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi

pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui keabsahannya.

2. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdara adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi

5 . <http://a-bong.blogspot.co.id/2010/08/aspek-hukum-perdagangan-melalui> 16.html (diakses 3 mei 2017)

berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdota. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *BW* yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III *BW*. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II *BW* yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II *BW* tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebebaskan-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 *BW*. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak *e-commerce*.

Kontrak dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut

8. Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Cet Ke-1, Makassar : Alauddin University Press 2013, h.150

bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam *e-commerce* kontrak yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana

kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan *check* atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara *merchant* dengan *customer*.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

d. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada *customer* pihak *merchant* menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada *customer* terhadap apa yang telah disepakati.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Puncta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Puncta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan antara merchant dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak *customer* dengan pihak *merchant* maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pacta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum

berdasarkan atas KUHPdata, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam *e-commerce* pihak *customer* diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak *merchant*, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak *merchant* pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan *customer* sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

2. Keabsahan Perjanjian Menurut UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan

“*Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalialia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Essensialia

Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur Naturalia

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

3. Unsur Accidentialia

Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.⁷

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung. hal. 99



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan

suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wet Boek* (KUHPerdara) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Ringkasnya, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

2. Keabsahan perjanjian jual beli *online* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hokum dan pilihan forummana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila

terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional.

A. Saran

1. Ketentuan yang dan tegas mengenai tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Bentuk kontrak dalam aktivitas *electronic commerce* pada hakekatnya disebut dengan *online contract* sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas *electronic commerce* menjadi suatu yang sangat penting. Karena KUHPerdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau *e-commerce*.
2. Perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan adanya factor pendorong dan penghambat, dengan adanya factor pendorong yang ada dalam *e-commerce* lebih banyak karena kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan *e-commerce* yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Salah satunya adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui *e-commerce*. Pelaksanaan kontrak dalam *e-commerce*

pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak *e-commerce* tidak mengalami hambatan, tentunya permasalahan mengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Abdul Halim Barkatullah., Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar.
- Abdullah Yusuf Ali, 1993, *Qur'an Terjemahan Dan Tafsirnya* , Jakarta : Pustaka Firdaus
- Arip Purkon, 2014, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Kathoda
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- EdmonMakarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : P.T. Alumni.
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Marilang, 2013, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Makassar : Alauddin University Press.
- Mariam Daruz Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Bandung : Alumni
- Misbahuddin, 2012, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, Makassar : Alauddin University Press.
- M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta : Tim Kemas Buku.
- M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta :Sasrawarna Printing.
- Pawit M. Yusup & Priyo Subekti, 2010, *Teori Dan Praktik Penelusuran Informasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*
- R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Shofie Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink v.Hoeve, Bandung-'S Gravenhage

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

WEBSITE

<http://Jayarmcf.blogspot.co.id/2011/02/proposal-mpph.html>,

Marketing. “*Lima TempatJualan Online*”. Blog Marketing.
<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

Andreas Viklund, *E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce*, 2009, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com)

Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-Commerce, <http://Elib.Unikom.Ac.Id>

bisnis.blogspot.co.id/2015/01/e-commerce-dan-tujuan-e-commerce.html

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1913/kapan-suatu-kesepakatan-terjadi-dalam-transaksi-ecommerce>

<http://dianisumadi.blogspot.co.id/2015/08/kajian-saat-terjadinya-kesepakatan.html>

<http://telaahhukum.blogspot.co.id/2016/02/perjanjian-electronic-commerce-sebagai.html>

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>

<http://wikispot-wikispot.blogspot.co.id/2012/03/karya-ilmiah-shopping-online.html>

<https://nindyastuti52.wordpress.com/2011/01/28/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis-online/>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 2412/SI.1/PP.00.9/7- /2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 19 Juli 2017

*Kepada
Yth.*

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Tahli, M.Ag. (Sekretaris)
3. Istiqamah, S.H, M.H. (Penguji I)
4. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. (Penguji II)
5. Dr. Marilang, M.Hum. (Pembimbing I)
6. Erlina, S.H, M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Andi Tenri Ajeng P
N I M : 10500113292
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 532 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : **1. Dr. Marilang, SH., M.Hum**
2. Erlina, SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **Andi Teuri Ajeng. P**
N I M : 10500113292
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **"Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata"**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 21 Oktober 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 1990031 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I Jl. St. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 86492
Kampus H Jl. Yasin Limpo No. 36, Sangguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836*

Nomor : SL3A/PP.00.9/2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Andi Tenri Ajeng. P/10500113292

Kepada Yth :

1. **Dr. Marilang, SH, M.Hum** Sebagai Pembimbing I
2. **Erlina, SH, MH** Sebagai Pembimbing II

Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 15 November 2016
Waktu : 09.00 - selesai WITA
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Samata, 10 November 2016

Wassalam,



Iskandiah, SH. MH

NIP. 196801120 199503 2 001

Catatan :

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing Diharapkan Hadir

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE

Di Susun Dan Diajukan Oleh :


**ANDI TENRI AJENG P.
NIM : 10500113292**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Melanjutkan Penulisan Skripsi


Pada Tanggal : Desember 2016

DOSEN PEMBIMBING


Pembimbing I


Dr. Marilang, S.H., M.Hum
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing II


Erlina, S.H., M.H
NIP . 19691219 200501 2 003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Istiqamah, S.H., M.H
NIP . 196801120 199503 2 001

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**



Prof. Dr. H. Darussalam Svamsuddin M.Ag
NIP : 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa. Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1449 SL.I/PP.00.9/03/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 23 Maret 2017

Kepada

Yth. **Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Di-

Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : A. Tenri Ajeng P.
N I M : 10500113292
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Poros Malalang No. 99

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce"

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Marilang, SH.,M.Hum**
2. **Erlina, SH. MH**

Schubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar terhitung mulai tanggal 03 April 2017 – 03 Mei 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Harussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tj. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 068 Tahun 2017

T E N T A N G

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 24 Maret 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : Tugas **Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas **Penguji** melaksanakan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Keempat** : Tugas **Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Maret 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PERDAGANGAN

Jalan Rappocini Raya No. 219 Makassar
Telepon : +62411-453325 Fax. +62411-432029
Email: disdagmakassar@gmail.com HomePage: www.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 731 /Disdag/V/2017

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan No: 3799/S.01P/P2T/03/2017 Perihal Izin Penelitian. Maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI TENRI AJENG P**
NIM / Jurusan : 10500113292 / Hukum
Universitas : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Judul : " Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E - Commerce "

Telah melakukan penelitian / pendataan Pada Dinas Perdagangan Kota Makassar, untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Mei 2017



Drs. A. Momang Tisi, MM

Pangkat : Pembina

NIP. 196201151 99103 1 005

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 779 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Andi Tenri Ajeng P.
N I M : 10500113292
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Senin / 19 Juni 2017
Perihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E- Commerce."

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian

Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
: 1. Mujahidah, SE
: 2. Nasira Asri S.Com

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 13 Juni 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36. Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
 SEMESTER (.....) WISUDA PERIODE
 TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama : ANDI JENRI AJENG Y
NIM : 10500113292
Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL - BELI MELALUI E-COMMERCE".

MKDU (Dirasah Islamiyah)	NILAI MATA KULIAH		JUMLAH RATA-RATA
	MKDK (Fikih/Ushul Fikih)	MKPP KESELURUHAN	
4	4	4	12



MULAHIDAH SE
 NIP : 19670309 199303 2 002

RIWAYAT HIDUP



Andi Tenri Ajeng Papada lahir di Pare-pare Tanggal 06 Februari 1996. Anak pertama dari enam bersaudara, anak dari Andi M. Takdir Hasyim S.E., M.M dan Vita Wahyudiani. Mulai memasuki jenjang pendidikan di TK AISYAH Kendari Sulawesi Tenggara selama 2 tahun lalu memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 87 Kabupaten Sinjai Barat dari kelas I sampai kelas III dan melanjutkan kelas IV sampai kelas VI di SDN 103 Kabupaten Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2007.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kelas VII sampai kelas VIII di SMP Negeri 1 Sinjai Barat dan kelas IX di SMP Negeri 2 Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMA PESANTREN IMMIM PUTRI MINASATE'NE PANGKEP dan tamat pada tahun 2013.

Setelah menyelesaikan pengabdian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013, dan menyelesaikan study pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R